



POLITEKNIK NEGERI BALI

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PIHAK EKSTERNAL**

**2021**



**TIM AREA PENGAWASAN ZI WBK**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi diterbitkan peraturan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 oleh Kementerian PAN dan RB tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata.

Politeknik Negeri Bali merupakan salah satu unit penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan publik serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hasil indeks persepsi korupsi dapat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .

### **B. Tujuan**

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi korupsi dari pengguna layanan Politeknik Negeri Bali sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan layanan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan pelaksanaan layanan yang bebas korupsi.

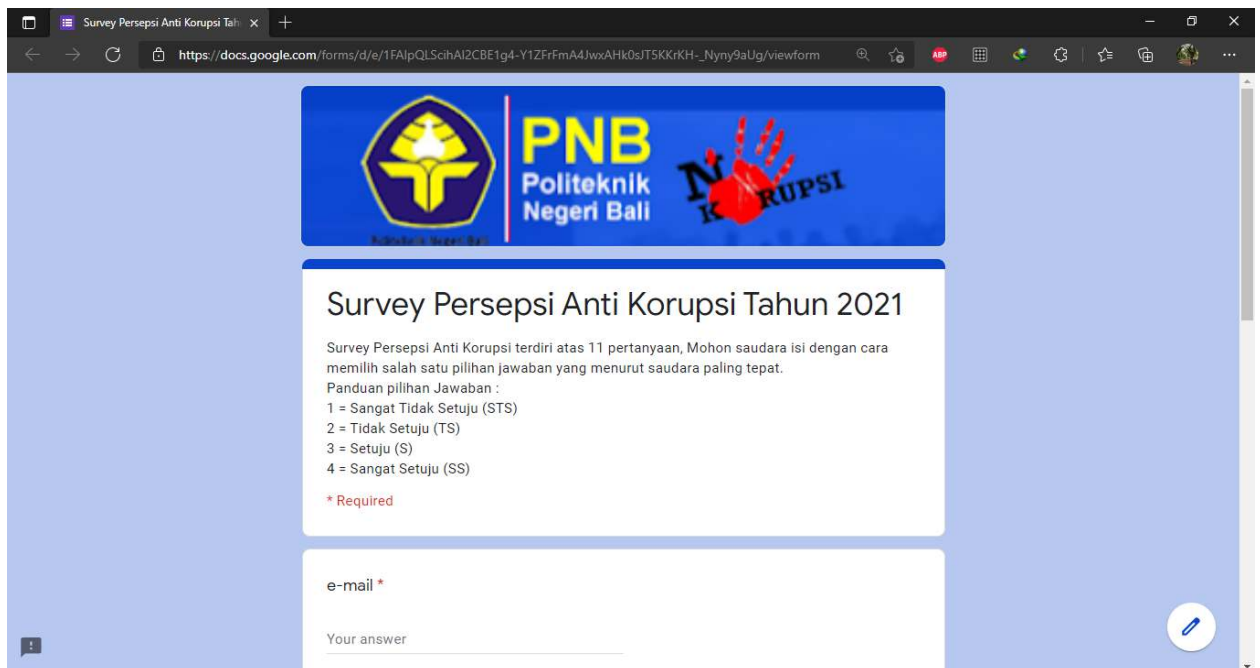
## BAB 2

### METODOLOGI

Survei indeks persepsi korupsi ditujukan untuk menilai pelayanan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali kepada pengguna layanan, seperti mahasiswa, DIDUKA, dan rekanan. Metode sampling yang digunakan dalam kajian ini adalah metode *simple random sampling*. Sampel dalam survei ini adalah responden yang masuk selama bulan Juli 2021, sehingga data yang diolah merupakan data yang terkumpul selama periode tersebut. Adapun prosedur yang dilakukan dalam melakukan survei ini adalah sebagai berikut:

- Membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan persepsi korupsi.
- Membuat formulir survei atas daftar pertanyaan yang sudah disusun.
- Melakukan penyebaran formulir survei. Survei dilakukan dengan mengakses link berikut:

[Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021 \(google.com\)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciAI2CBE1g4-Y1ZFrFmA4JwAHk0sJT5KkRKH-Nyny9aUg/viewform)



The screenshot shows a Google Forms interface for a survey titled "Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021". The header features the logo of Politeknik Negeri Bali (PNB) and the slogan "No KORUPSI". The survey instructions state that it consists of 11 questions and provides a 4-point Likert scale: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Setuju (S), and 4 = Sangat Setuju (SS). The first question is "e-mail \*" with a text input field for the respondent's answer.

#### Teknis Analisis dan Evaluasi

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor

persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Responden memilih jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak Setuju untuk mengukur masing-masing indikator persepsi korupsi.
2. Jawaban tersebut kemudian dicari bobot rata-ratanya di setiap indikator. Skala indeks persepsi korupsi mendekati nilai 4 mencerminkan penilaian korupsi semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	A	Bersih dari Korupsi

### Prosedur Survei

Responden dapat mengisi survei melalui google form persepsi korupsi terhadap pengurusan pelayanan baik melalui komputer/laptop/smartphone. Untuk mengetahui tingkat IPK pelayanan akademik dan non akademik dilingkungan Politeknik Negeri Bali yang ditujukan kepada pihak eksternal, seperti mahasiswa, diduka, dan rekanan diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam survei. Kajian survei ini menggunakan acuan yang telah dilakukan oleh lembaga lainnya dan disimpulkan beberapa indikator yang mencerminkan persepsi mengenai korupsi adalah sebagai berikut:

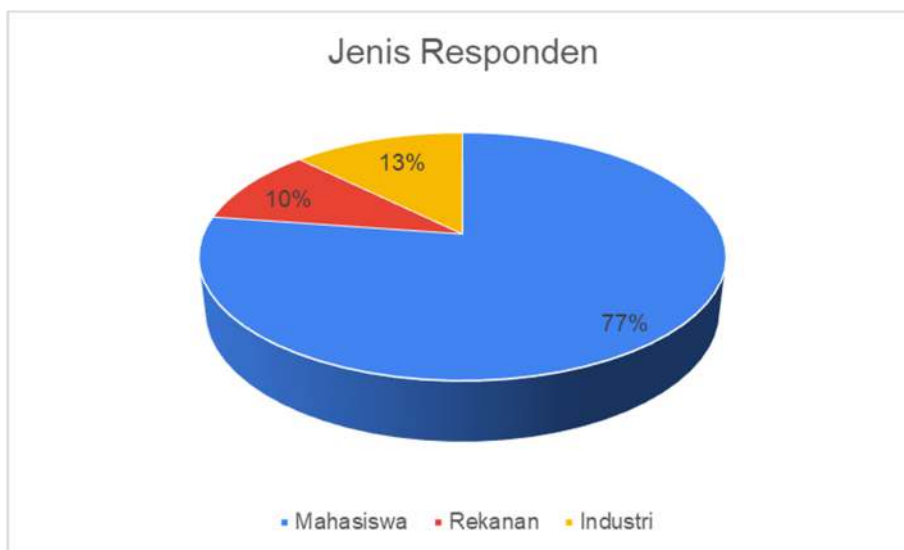
1. Perbuatan curang
2. Gratifikasi
3. Pungutan liar
4. Praktik Pencaloan / Perantara
5. Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya
6. Penawaran imbalan
7. Petugas terindikasi menghendaki praktik suap
8. Hadiah
9. Praktik KKN dalam pengurusan pelayanan
10. Kegiatan/media anti korupsi

## BAB 3

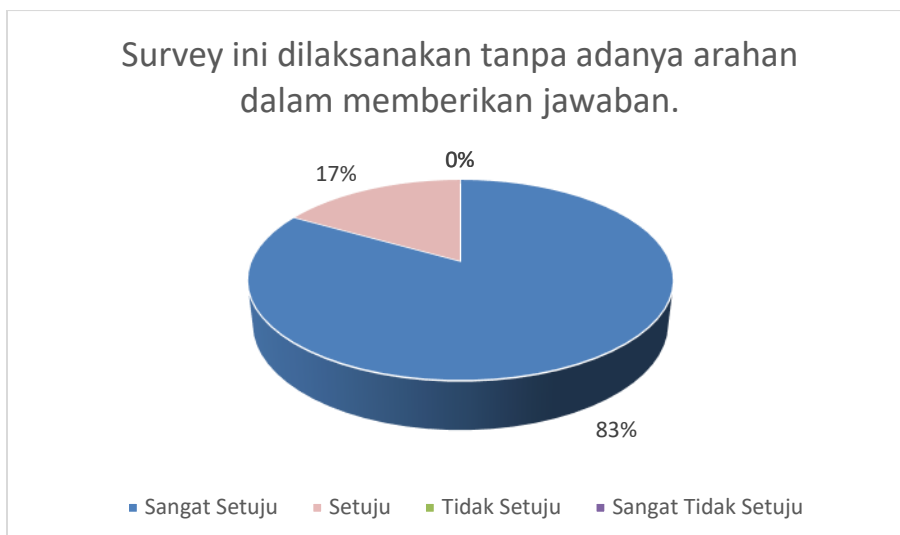
### HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### A. Profil Responden

Berdasarkan metode sampling yang digunakan, jumlah responden survei indeks persepsi korupsi terhadap pengurusan pelayanan baik akademik dan non akademik mencapai 119 responden yang terdiri dari mahasiswa, DUDIKA, dan rekanan.



Pengisian survei ini dilaksanakan tanpa adanya arahan dalam memberi jawaban. Hal ini dapat terlihat pada hasil berikut:



## B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

### 1 Perbuatan Curang



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat praktik kecurangan dalam layanan di Politeknik Negeri Bali, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,71.

### 2 Gratifikasi



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat permintaan/penerimaan imbalan di luar ketentuan atas layanan yang diberikan, namun masih berada dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pada indeks mencapai 3,72.

### 3 Pungutan Liar



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat pungutan liar atas setiap layanan yang diberikan di Politeknik Negeri Bali, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini dapat dilihat pada indeks yang mencapai 3,76.

### 4 Praktik Pencaloan / Perantara



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Politeknik Negeri Bali, namun masih batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,72.



5 Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya



Hasil persepsi responden bahwa biaya masih terdapat biaya layanan yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,71.

6 Penawaran Imbalan



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat penawaran dalam rangka memperoleh setiap layanan yang lebih cepat dengan imbalan tertentu, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,72.

7 Petugas Terindikasi Menghendaki Praktik Suap



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat permintaan komisi dalam pengurusan di setiap layanan, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,75.

8 Hadiah



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat pemberian tanda terima kasih selain ucapan terima kasih atas setiap layanan yang diberikan, namun masih dalam batas yang wajar. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,68.

### 9. Praktik KKN dalam Pengurusan Layanan



Hasil persepsi responden bahwa masih terdapat praktik KKN dalam pengurusan layanan di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,61.

### 10. Kegiatan/Media Anti Korupsi



Hasil persepsi responden bahwa sudah terdapat kegiatan / media anti korupsi di Politeknik Negeri Bali. Hal ini ditunjukkan dari indeks yang mencapai 3,72.

## 11. Analisis Survei

Survei yang dilakukan menggunakan media Google Form yang disebarakan kepada 119 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif yang diisi oleh pihak eksternal Politeknik Negeri Bali. Indeks IPK memiliki skala antara 1 yang artinya sangat korup sampai dengan 4 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada pengurusan pelayanan baik akademik maupun non akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bali. Indeks IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 oleh Kementerian PAN dan RB tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, berikut nilai per indikator IPK dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

Nilai Per Indikator dari Indeks Persepsi Korupsi

No	Indikator	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Perbuatan curang	3,83	A
2	Gratifikasi	3,71	A
3	Pungutan liar	3,72	A
4	Praktik pencaloan / perantara	3,76	A
5	Memberi tarif yang lebih dari yang seharusnya	3,71	A
6	Penawaran imbalan	3,72	A
7	Petugas terindikasi menghadapi praktik suap	3,75	A
8	Hadiah	3,68	A
9	Praktik KKN dalam pengurusan layanan	3,61	A
10	Kegiatan/media anti korupsi	3,72	A
	Rata-rata	3,72	A

Jumlah nilai persepsi korupsi per indikator menunjukkan penilaian pihak eksternal terhadap indikator unsur korupsi dalam pengurusan pelayanan. Unsur-unsur pelayanan SKP berada pada jumlah kisaran interval 3,26 – 4,00 atau mutu pelayanan A (BERSIH DARI KORUPSI).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 10 indikator memiliki nilai persepsi tertinggi dengan mutu layanan A. Dari sepuluh indikator tersebut, indikator praktik KKN dalam pengurusan layanan memiliki nilai terendah sebesar 3,61. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapatnya praktik-praktik KKN dalam pengurusan layanan di Politeknik Negeri Bali. Namun hal ini masih dalam batas wajar dan tidak berpotensi menimbulkan KKN yang material. Untuk mengurangi praktik KKN dalam pengurusan layanan, telah dilakukan kegiatan kampanye melalui banner-banner dan sosialisasi di beberapa kegiatan di Politeknik Negeri Bali. Perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran risiko korupsi dengan cara brainstorming secara berkala kepada seluruh pengurusan pelayanan, membangun budaya transparansi akuntabilitas, dan integritas agar segala pelayanan dapat berjalan secara bersih dan transparan.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Politeknik Negeri Bali diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,72 atau masuk kategori bersih dari korupsi (kisaran nilai 3.25 – 4.00). Dengan demikian, petugas yang ada di Lingkungan Politeknik Negeri Bali dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu praktik KKN dalam pengurusan layanan, namun masih dalam kategori bersih dari korupsi. Hal ini masih dalam batas wajar dan tidak berpotensi menimbulkan KKN yang material.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil survei IPK terhadap pengurusan pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bali, maka perlu dilakukan kegiatan kampanye melalui banner-banner dan sosialisasi di beberapa kegiatan di Politeknik Negeri Bali. Bentuk kampanye dapat dilakukan dengan menyisipkan informasi terkait media anti korupsi pada kegiatan yang dihadiri pihak eksternal Politeknik Negeri Bali dan melalui media online, berupa sosial media dan website. Perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran risiko korupsi dengan cara brainstorming secara berkala kepada seluruh pengurusan pelayanan, membangun budaya transparansi akuntabilitas, dan integritas agar segala pelayanan dapat berjalan secara bersih dan transparan.